

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TERMARJINKANDI KOTA DENPASAR

Ni Made Suciani

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
Jalan Letda Tantular, Denpasar
email:made_suciani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Beberapa sekolah mengalami keadaan termerjinkan di tengah hiruk pikuk Kota Denpasar. Permasalahan yang dikaji yaitu faktor penyebab beberapa sekolah mengalami marjinalisasi, bagaimana penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinkan, dan bagaimana implementasinya terkait dengan lima pilar kebijakan pendidikan nasional serta implikasinya terhadap siswa, institusi sekolah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori dekonstruksi, teori strukturasi, dan teori pendidikan kritis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan teknik dokumenter, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, munculnya marjinalisasi pada beberapa sekolah karena faktor dualisme kultural antara sekolah negeri dan sekolah swasta, yang meliputi pandangan dan kebijakan pemerintah, keterpinggiran guru swasta dan dampak sertifikasi guru. Faktor lain yaitu budaya, karakter dan pandangan masyarakat terhadap sekolah negeri serta *labelling* terhadap sekolah swasta marjinal, serta minimnya pengelolaan finansial serta pencitraan sekolah untuk bertahan demi gengsi. Selain itu terdapat juga faktor teknis seperti lemahnya pengelolaan sumber daya manusia, lemahnya kompetensi dan usaha-usaha peningkatan kompetensi juga lemahnya komunikasi dan kemitraan sekolah dengan pemangku kepentingan, serta tidak adanya supervisi dan evaluasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinkan dapat dilihat dari sisi *intangible* seperti disekonomi komunitas, dehumanisasi pendidikan dan budaya pencitraan pada sekolah termarjinkan. Sedangkan dari sisi *tangible* yaitu melalui hasil evaluasi diri sekolah. Implementasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinkan terkait dengan lima pilar kebijakan pendidikan nasional yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan layanan selain itu dianalisis juga implikasinya terhadap siswa, insitusi sekolah dan masyarakat.

Kata kunci: penyelenggaraan pendidikan, sekolah termarjinkan, dan dualisme kultural.

PENDAHULUAN

Kajian ini pada intinya ingin mengkaji fenomena tentang adanya beberapa sekolah yang mengalami keadaan hampir-hampir bubar atau sering disebut sebagai sekolah “mati segan, hidup tak mau”. Undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 4 menjelaskan

tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pada ayat 1, disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada kenyataannya, tidak semua sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan baik bahkan ada sekolah yang implementasinya masih jauh dari harapan.

Fenomena siswa yang tergolong dalam kemampuan intelektual rendah dan kemampuan ekonomi rendah, atau sering disebut sebagai “siswa yang miskin dan bodoh”, yang hanya bisa masuk ke sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai kategori swasta marjinal, menjadi menarik untuk dicermati. Darmaningtyas (2007: 339) mengatakan bahwa sekolah termarjinalkan atau terpinggirkan adalah satu-satunya peluang bagi anak yang tergolong miskin dan bodoh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan beberapa sekolah di Kota Denpasar mengalami marjinalisasi?; (2) Bagaimana penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinalkan di Kota Denpasar?; (3) Bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinalkan terkait dengan lima pilar kebijakan pendidikan nasional serta implikasinya terhadap siswa, institusi sekolah, dan masyarakat?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab beberapa sekolah mengalami marjinalisasi, menganalisis bagaimana penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinalkan di Kota Denpasar serta bagaimana implementasinya terkait lima pilar kebijakan pendidikan nasional dan implikasinya terhadap siswa, sekolah dan masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan makna pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah termarjinalkan dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dari perspektif kajian budaya. Pada tingkat praktis, penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemangku kepentingan dalam pendidikan untuk mempertimbangkan realitas sosio-kultural bangsa dalam upaya proses penyadaran dan pembebasan dari ketidakberdayaan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan eksploratif-kualitatif, yaitu dengan observasi langsung ke lokasi yang

menjadi objek penelitian ini yaitu SMA A, SMA B dan SMA C, dalam usaha mengembangkan teori berdasarkan data lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Untuk pengecekan dilakukan secara silang atau triangulasi data, sehingga akurasi data menjadi lebih terjamin.

PEMBAHASAN

Derrida berpendapat, logosentrisme sekurang-kurangnya mengandung dua ciri. Pertama, prosedur-prosedur yang ada harus diakui sebagai suatu orientasi yang paling umum. Kedua, prosedur-prosedur itu harus merupakan suara yang berdaulat yang tidak lagi dipermasalahkan atau diperdebatkan (Hadiwinata, 1994: 23). Dalam penelitian ini, kebijakan penyelenggaraan pendidikan dipandang sebagai logosenstris, dibongkar dengan metode dekonstruksi, memunculkan berbagai kelemahan yang cenderung meminggirkan sekolah swasta marjinal. Kebijakan ini juga diperparah oleh adanya dualisme kultural antara sekolah negeri dan sekolah swasta, serta adanya labeling pada sekolah swasta.

Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktek-praktek sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 2010: 3-4). Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian bahwa munculnya sekolah termarjinalkan bukan saja karena struktur yang sudah ada, bukan juga karena orang-orang yang terlibat di dalamnya yang kurang berkualitas tetapi karena interaksi keduanya yang berlangsung terus-menerus yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karena adanya dualitas antara agen dan struktur ini memunculkan praktek-praktek yang terkadang tidak disadari keluar dari struktur lama, sehingga melahirkan struktur baru. Dengan demikian bagi beberapa orang tertentu karena tidak ada pilihan, struktur memaksa mereka, pada akhirnya mereka tetap milih sekolah termarjinalkan ini. Demikian pula bagi guru dan pegawai, yang penting bagi mereka adalah tetap bisa mengajar dan bertugas sebagai pegawai saja sudah cukup. Karena status sebagai guru dan sebagai pegawai masih jadi idaman bagi mereka, meskipun secara finansial gaji mereka tidak mencukupi. Hal ini sesuai dengan apa dijelaskan oleh Ritzer (2010: 555), bahwa hubungan antara ruang dan waktu bersifat kodrati dan menyangkut

makna serta hakikat tindakan itu sendiri, karena pelaku dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, setiap tatanan masyarakat selalu dikaitkan dengan peran sosial dan fungsinya.

Pemikiran Freire bisa dianggap merupakan akar bagi gerakan pengembangan satu model pendekatan/proses pendidikan kritis. Menurut Freire, model pendidikan kritis ini pada dasarnya satu bentuk pendekatan yang diyakini mampu membantu kaum marjinal dalam masyarakat menyadari realitas sosial yang mereka hadapi dan sekaligus menjadi awal bagi upaya mengubah sistem serta struktur yang membelenggu mereka. Dengan kata lain, model pendidikan ini akan mendorong kelompok bawah ini untuk berupaya membebaskan dirinya sendiri melalui proses penyadaran diri yang sangat terkait dengan apa yang disebut Freire sebagai kesadaran kritis (Widja, 2009: 40-41). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Lemahnya pengelolaan sumber daya manusia terutama pada tingkat pemahaman tentang manajemen sekolah. Secara umum mereka tidak menyadari ketidaktahuan mereka tentang teori manajemen sekolah. Karena ketidaktahuan inilah menyebabkan mereka juga tahu apa yang seharusnya dan sebaiknya mereka lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sekolahnya. Dengan kata lain tidak terjadi pemahaman terhadap hakikat pendidikan secara kritis pada sekolah termarjinalkan tersebut. Karena tidak pemahaman dan kesadaran inilah menyebabkan mereka tidak mampu melepaskan diri keterpinggiran.

Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarjinalkan ternyata pada akhirnya mereproduksi sistem sosial yang sangat sesuai dengan analisis yang dilakukan Paulo Friere dengan pendidikan kritisnya. Di mana pada lokasi penelitian sama sekali tidak terjadi penyadaran dan pembebasan dari ketidakberdayaan baik pada siswa, institusi sekolah maupun masyarakat sekitarnya. Di sekolah tidak banyak diberikan pengetahuan kepada peserta didik melalui materi pelajaran yang bisa menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran melawan opresi dan eksploitasi kelas dominan. Pendidik belum memiliki komitmen membangkitkan dan memberdayakan peserta didik, sehingga nantinya bisa terjun ke tengah masyarakat sebagai agen pemberdayaan dan pembebasan masyarakat lemah dari dominasi budaya dan politik kelompok masyarakat yang kuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryatno (2011: 2-3) bahwa visi pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa

dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen dan bebas dari berbagai kepentingan, tapi justru menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan.

Rohman (2010: 109-110) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari unsur-unsur *intangible* dan *tangible*. Dalam penelitian ini, unsur *intangible* dapat terlihat adanya disekonomi komunitas sekolah, dehumanisasi pendidikan, yang menurut Freire, digambarkan sebagai suatu kondisi kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri. Sedangkan dari unsur *tangible*, terlihat dari hasil analisis evaluasi diri sekolah. Secara kuantitatif ditemukan bahwa semua pencapaian standar pendidikan pada sekolah termarginalkan berada di bawah rata-rata standar SMA lainnya di Kota Denpasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, faktor-faktor penyebab sekolah mengalami marginalisasi adalah dualisme kultural antara sekolah negeri dan sekolah swasta, keterpinggiran guru swasta, labeling terhadap sekolah swasta marginal, minimnya pengelolaan finansial, pencitraan sekolah untuk bertahan demi gengsi serta lemahnya manajemen sekolah. Kondisi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarginalkan yang terlihat adalah disekonomi komunitas sekolah, dehumanisasi pendidikan, serta hasil evaluasi diri sekolah yang masih rendah. Implementasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah termarginalkan jika dikaitkan dengan lima pilar kebijakan pendidikan nasional adalah ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai serta berimplikasi pada siswa, sekolah dan masyarakat.

Disarankan kepada pemerintah, hendaknya memberikan perhatian yang lebih kepada sekolah-sekolah termarginalkan di Kota Denpasar. Dalam sistem penerimaan siswa baru, perlu diterapkan kebijakan baru yang tidak hanya menggunakan sistem tunggal dalam bentuk tes ujian masuk, tetapi juga mendasarkan pada kemampuan sosial ekonomi calon murid. Kepala sekolah seharusnya mengelola pendidikan dengan cara membuat laporan evaluasi diri sekolah dengan jujur. Kepada pihak yayasan agar senantiasa melakukan

pembinaan dan pengembangan sekolah yang dimilikinya serta mempertimbangkan dana pengelolaan sekolah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Banyak terima kasih disampaikan kepada staf pengajar dan staf administrasi Program Doktor Kajian Budaya, Program Studi Pascasarjana, Universitas Udayana. Apresiasi juga penulis berikan kepada seluruh komponen dari SMA termarjinalkan di Kota Denpasar untuk data dan informasi yang diberikan kepada penulis berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaningtyas. 2007. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 1994. "Theatrum Politikum: Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia", dalam *Jurnal Kebudayaan KALAM*, No. 1 Th. 1994. Yayasan Kalam dan Penerbit Pustaka Garifiti: Jakarta
- Nuryatno, Agus M. 2011. *Mazhab Pendidikan Kritis*. Resist Book: Yogyakarta.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rohman, Arif. 2010. *Pendidikan Kompartaif*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Suciani, Ni Made. 2014. "Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Marjinal di Kota Denpasar". disertasi Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Widja, I Gde. 2009. *Pendidikan sebagai Idiologi Budaya: Suatu Pengantar kearah Pendidikan Kritis*. Denpasar: Unud-Sari Kahyangan Indonesia.